

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan banjir yang sangat tinggi. Banjir merupakan bencana yang hampir terjadi setiap tahun di Indonesia. Berdasarkan data infografis BNPB terdapat 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021 Jumlah kejadian tersebut didominasi antara lain bencana banjir yang terjadi 1.794 kejadian, 1.577 cuaca ekstrem, 1.321 tanah longsor, 579 kebakaran hutan dan lahan, 91 gelombang pasang dan abrasi, 24 gempa bumi, 15 kekeringan dan 1 erupsi gunung api. Dampak dari kejadian tersebut adalah 728 orang meninggal dunia, 87 orang hilang, 14.915 luka-luka, 7.630.692 menderita dan mengungsi, 158.658 rumah rusak, 4.445 fasilitas umum rusak, 664 kantor rusak dan 505 jembatan rusak, Lima provinsi tertinggi kejadian bencana adalah provinsi Jawa Barat 1.358 kejadian bencana, 622 Jawa Tengah, 366 Jawa Timur, 279 Aceh, dan 272 Kalimantan Selatan. Perbandingan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2020 tercatat 4.649 kejadian bencana, dan 2021 tercatat 5.402 atau mengalami kenaikan 16,2% kejadian bencana. (BNPB, 2021)

Bencana banjir yang paling besar terjadi dalam 10 tahun terakhir pada tahun 2016 dengan hampir seluruh wilayah Indonesia, antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Kemudian di bulan Agustus–Oktober 2016 banjir besar kembali melanda Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jambi (CFE-DM, 2018). Bencana banjir ini mengakibatkan 250 orang meninggal, 1.413 orang luka-luka, 2.916.688 orang terdampak, 3.264 unit rumah rusak berat, 3.467 unit rumah rusak sedang, 8.141 unit rumah rusak ringan, 334.017 unit rumah terendam, 92 unit fasilitas kesehatan, 281 unit fasilitas peribadatan rusak, dan 1.137 unit fasilitas pendidikan rusak (BNPB, 2020).

Bencana banjir di Indonesia di sebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pertama tingginya kejadian bencana banjir di Indonesia adalah disebabkan oleh tingginya curah

hujan (Sulaiman et al., 2020). Banjir yang terjadi di daerah perkotaan umumnya terjadi akibat adanya luapan air yang tidak dapat tertampung oleh sistem drainase perkotaan seperti sungai, gorong-gorong, parit dan saluran pengaliran air lainnya. Perubahan guna lahan di kawasan hulu menyebabkan semakin banyak debit air yang menuju ke sistem drainase sehingga akan membebani kapasitas sistem drainase tersebut. Secara garis besar banjir disebabkan oleh faktor Alam seperti Curah Hujan dan Jenis tanah, tingkat kelerengan kawasan, maupun disebabkan oleh Antropogenik (manusia) seperti Perubahan guna lahan, kapasitas drainase yang tidak memadai, dan bisa juga disebabkan oleh keduanya yaitu alam dan Antropogenik seperti Erosi dan sedimentasi (Nugroho & Handayani, 2021)

Faktor yang menyebabkan Kalimantan Tengah rawan banjir ada dua, yaitu faktor alam dan faktor non alam. Faktor alam yakni tingginya intensitas curah hujan, namun pada faktor non alam yaitu banyaknya gunung yang gundul, hutan dibabat habis dengan menjadikannya sebagai lahan untuk perumahan, dan banyaknya tambang tanpa reklamasi serta banyaknya izin membuka lahan baru untuk kelapa sawit (Laili, 2021).

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukotakan Pangkalan Bun dengan luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km<sup>2</sup>. Terdapat 3 sungai yang melintasi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Sungai Arut, Sungai Kumai, dan Sungai Lamandau dengan kedalaman rata-rata 5 meter dan lebar 100-300 meter. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Arut Selatan. Kecamatan Arut Selatan memiliki 20 Kelurahan yang tersebar di wilayahnya, salah satunya Desa Kelurahan Baru. Menurut Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 Desa Kelurahan Baru ini berbatasan dengan Desa Kelurahan Raja dengan seberang Kecamatan Arut selatan berada di As Sungai Arut ditandai oleh PABU.A-11 dengan koordinat 2°40'18,325'' LS dan 111° 38'02,163''BT. PABU.A-11 selanjutnya ke arah Barat melewati Sungai Arut sampai pada PABU.A-01 dengan koordinat 2°40'18,325'' LS dan 111° 38'02,163''BT yang terletak di As Sungai Arut atau perbatasan RT.01 Kelurahan Mendawai dengan RT.01 Kelurahan Raja yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Raja dengan Kelurahan Baru dan Kelurahan Raja seberang Kecamatan Arut Selatan.

Sungai Arut yang secara geografis membelah pusat kota dengan suhu rata-rata setahun sekitar 24°C. Bulan terpanas adalah Bulan Oktober, dengan suhu rata-rata 24°C, dan terdingin Bulan Juli, sekitar 22°C. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 2778 mm. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah Bulan November, dengan rata-rata 386 mm, dan yang terendah Bulan September, rata-rata 66 mm. Topografi Desa Kelurahan Baru merupakan *depression area* (lingkungan air dan sebagian besar adalah rawa). Sungai Arut dimanfaatkan oleh warganya sebagai tempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari serta sebagai tempat tinggal penduduk dengan membangun rumah-rumah penduduk di atas tiang-tiang di tepi sungai atau di atas sungai (Purwanto & Gultom, 2013). Perkembangan kawasan di Bantaran Sungai Arut tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah, banyak permasalahan yang timbul di kawasan permukiman Bantaran Sungai Arut, salah satunya bencana banjir. Faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di kawasan Sungai Arut akibat musim penghujan dan kondisi pinggir sungai yang kotor oleh kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai (Rusmita, 2017).

Pada awal tahun 2020 ini dibuka dengan adanya Virus COVID-19 yang melanda dunia. Virus yang awalnya hanya berada di salah satu kota di China yaitu Wuhan, akhirnya menyebar ke semua negara di dunia. Banyak orang merasakan sesak napas, kejang-kejang, hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Setiap harinya kasus terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona terus bertambah (Yanuarita H A, 2020). Kondisi ini sangat berdampak pada bencana banjir yang dirasakan oleh masyarakat pada masa COVID-19, tidak hanya pada kerugian fisik yang dapat mempengaruhi perekonomian warga, namun juga psikologi dan kesehatan warga sekitar. Untuk meminimalisir kerugian yang besar akibat ancaman bencana banjir, maka diharapkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk tetap siaga (Afni, 2018). Akan tetapi kondisi ini jauh berbeda karena masyarakat juga dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang tentunya berisiko tertular maupun menularkan COVID-19. Penanganan bencana di era pandemi saat ini menjadikan tantangannya kian berlipat dibanding kondisi bencana di masa tidak pandemi COVID-19. Bencana banjir mengharuskan masyarakat untuk berkumpul di

lokasi pengungsian sedangkan COVID-19 mengharuskan warga untuk jaga jarak (Natsir et al., 2021).

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, pasal 23 diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja secara optimal yang meliputi pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit akibat kerja. Berlandaskan tujuan utama Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seperti diketahui melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1970 salah satunya yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 463 / MEN / 1993 berisi konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja yaitu perilaku yang tidak aman karena kurangnya kesadaran pekerja dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Dengan hal ini mengharuskan warga Desa Kelurahan Baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan terjadinya potensi-potensi bencana banjir. Terlebih lagi, khusus para pedagang yang beraktivitas di tepi sungai untuk lebih berhati-hati dengan mengamati keadaan sungai, situasi cuaca dan curah hujan, serta mengikuti panduan yang diarahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar bencana tidak memakan korban dan kesiapsiagaan membuahkan hasil dan tujuan yang diinginkan bersama.

Kesiapsiagaan adalah kegiatan yang bersifat perlindungan aktif yang dilakukan pada saat bencana terjadi dan memberikan solusi jangka pendek untuk memberikan dukungan bagi pemulihan jangka panjang. Parameter yang digunakan untuk kesiapsiagaan masyarakat adalah *framework* yang dikembangkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan UNESCO/ISDR pada tahun 2006. Ada lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam kesiapsigaan untuk mengantisipasi bencana yaitu 1) pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana, 2) kebijakan dan panduan, 3) rencana tanggap darurat, 4) sistem peringatan bencana, 5) mobilisasi sumber daya (Hidayati et al., 2011)

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang di lakukan pada Hari Selasa, 29 Maret 2022 dengan mewawancarai salah satu perangkat daerah di Desa Kelurahan Baru, dapat diperoleh bahwa Desa tersebut merupakan wilayah yang rawan banjir akibat tingginya curah hujan. Di Indonesia, musim penghujan dengan rata-rata curah hujan tertinggi

yaitu pada Bulan September-Desember. Bencana banjir yang terjadi merupakan bencana banjir kiriman arus dan volume sungai yang meningkat serta sudah menjadi tradisi setiap tahunan bagi masyarakat Desa Kelurahan Baru. Akibat terjadinya bencana banjir yang sering terjadi, masyarakat mengalami beberapa gangguan kesehatan antara lain: gatal-gatal, demam, dan penyakit kulit lainnya. Pemerintah Desa Kelurahan Baru juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh dari mewabahnya Virus COVID-19 yang bersamaan dengan terjadinya bencana banjir karena kondisi tersebut akan memberikan dampak negatif dua kali lipat terhadap kesehatan tubuh.

Dampak bencana banjir yang terjadi diakibatkan oleh lemahnya atau kurangnya sanitasi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Kelurahan Baru. Terbukti dalam survey yang peneliti lakukan bahwasannya tata letak perumahan warga yang berada di Desa Kelurahan Baru kurang teratur sehingga mengakibatkan air sungai mudah memasuki kawasan pemukiman warga jika terjadi peluapan volume sungai akibat hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu menurut pemaparan narasumber, bencana banjir tersebut juga berdampak pada sistem perekonomian masyarakat karena rusaknya permukiman warga yang terendam. Dengan hal ini, kapasitas air bersih di kawasan Kelurahan Baru menjadi sangat berkurang bahkan hilang karena air bersih yang warga tampung terkontaminasi dengan air sungai. Kemudian jika masyarakat tetap menggunakan air yang terkontaminasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci, kakus atau pun dikonsumsi, maka kesehatan masyarakat Kelurahan Baru akan terancam penyakit yang lebih berbahaya lagi, contohnya infeksi kulit, diare, muntaber, dan sebagainya.

Upaya penanggulangan oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru bagi masyarakat dalam menghadapi banjir dengan cara membuat kebijakan untuk membangun badan jalan lebih tinggi 1-2 meter dan menaikkan tongkat rumah lebih tinggi dari badan jalan. Pemerintah Desa Kelurahan Baru tidak mengeluarkan bantuan bebas banjir dari pengembang. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru adalah dengan menghimbau masyarakatnya agar meminta izin pembangunan rumah dari pemerintah daerah baik ke kelurahan dan kecamatan.

Namun, Desa Kelurahan Baru tersebut tidak memiliki Peraturan Desa (PerDes) yang mengatur mengenai tindakan yang perlu dilakukan sebelum, selama, dan setelah banjir. Hal ini membuat Pemerintahan Desa, termasuk juga masyarakat, mengalami kesulitan dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi karena tidak adanya pedoman yang jelas untuk koordinasi tindakan dan tujuan yang harus dicapai dalam penanganan banjir secara cepat dan efektif. Terkait peraturan dan kebijakan, Pemerintah Desa mengacu pada peraturan daerah kabupaten dalam penanggulangan bencana dan evakuasi. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pemerintah desa mengikuti Panduan SOP penanganan pra banjir, banjir, serta pasca banjir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pemerintah Kelurahan Baru juga belum menyusun Rencana Kontinjensi (ReinKon) di masa pandemi Virus COVID-19. Tanpa adanya regulasi yang jelas dalam penanganan banjir selama pandemi COVID-19, Pemerintah Desa Kelurahan Baru saat ini hanya melakukan upaya berupa himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat evakuasi. Namun, ketika korban banjir telah dievakuasi dan disatukan dalam satu tempat penginapan sementara, interaksi antar korban bencana maupun dengan petugas evakuasi yang berada di sana menjadi kurang terjaga dalam hal masalah protokol kesehatan. Hal ini dapat mengakibatkan potensi penyebaran COVID-19 yang lebih tinggi di antara mereka. Dampak dari masalah ini adalah peningkatan potensi penyebaran COVID-19 di antara korban banjir dan petugas evakuasi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan lonjakan kasus COVID-19 di wilayah tersebut.

Selain itu, Pemerintah Desa Kelurahan Baru juga masih sangat minim dalam penggunaan EWS (*Early Warning System*) yang bertujuan untuk mendeteksi secara singkat potensi terjadinya banjir. Pemerintah Desa Kelurahan Baru pun hanya mengandalkan SDM yang ada di BMKG untuk mendapatkan informasi curah hujan dan sebagainya yang mengakibatkan bencana, khususnya bencana banjir karena keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran untuk memenuhi kesiapsiagaan bencana banjir. Hal ini terjadi karena Pemerintah Desa Kelurahan Baru lebih memfokuskan anggaran pada pemulihan COVID-19 yang semakin meningkat.

Latar belakang yang mencuat dari situasi yang diuraikan di atas menjadi sangat penting untuk melaksanakan penelitian terkait dengan dampak ganda bencana banjir di masa pandemi COVID-19. Pada kenyataannya, penanggulangan bencana banjir masih belum memprioritaskan kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan respons terhadap pandemi COVID-19. Kekurangan peraturan dan protokol yang tepat untuk menghadapi kedua ancaman tersebut secara bersamaan dapat membawa dampak serius bagi kesejahteraan masyarakat, kesehatan mereka, serta kemampuan untuk pulih dan beradaptasi setelah bencana.

Dalam konteks ini, penelitian menjadi sangat relevan dan mendesak. Penelitian ini akan mendalami tentang bagaimana masyarakat Desa Kelurahan Baru menghadapi tantangan ganda dari banjir dan COVID-19, sejauh mana kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi situasi ini, serta hambatan dan tantangan yang mereka alami dalam menjalankan protokol kesehatan di tengah bencana banjir. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi tindakan dan respons pemerintah setempat dalam mengatasi dua krisis ini secara bersamaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dampak ganda dari bencana banjir dan pandemi COVID-19, serta memberikan panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan terkoordinasi dalam menghadapinya. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bersiap menghadapi bencana ganda yang dapat terjadi di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi fokus analisis terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi banjir dalam konteks pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru.

Permasalahan utama adalah tingkat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap risiko banjir serta upaya kesiapsiagaan banjir pada masa pandemi COVID-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru. Dalam menghadapi ancaman banjir,

pemahaman masyarakat terkait risiko banjir serta kesiapsiagaan yang mereka miliki akan memengaruhi tingkat kesiapsiagaan yang efektif.

Permasalahan selanjutnya adalah kebijakan dan panduan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru dalam rangka mengatasi banjir di tengah situasi pandemi COVID-19. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi apakah sudah memadai dan efektif dalam melindungi masyarakat dan infrastruktur dari dampak banjir, sambil memperhatikan kondisi pandemi.

Analisis juga akan menyoroti perencanaan tanggap darurat terkait kesiapsiagaan banjir yang sudah ada, termasuk apakah perencanaan tersebut sudah disesuaikan dengan konteks pandemi COVID-19. Terdapat pertanyaan apakah ada langkah-langkah khusus yang telah diambil dalam rencana tanggap darurat untuk mengatasi banjir saat pandemi.

Sistem peringatan dini adalah permasalahan penting lainnya. Bagaimana sistem peringatan dini yang digunakan dalam kesiapsiagaan banjir di masa pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru? Apakah sistem tersebut sudah memadai dalam memberikan peringatan yang tepat waktu kepada masyarakat?

Mobilisasi sumber daya manusia dalam kesiapsiagaan banjir selama pandemi COVID-19 menjadi fokus permasalahan terakhir. Bagaimana proses mobilisasi sumber daya manusia, termasuk keterlibatan masyarakat, dalam upaya mengatasi banjir di tengah situasi pandemi?

Rumusan masalah di atas akan menjadi dasar untuk menganalisis tantangan dan potensi perbaikan dalam kesiapsiagaan menghadapi banjir selama pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Pada Masa Pandemi COVID-19 Oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana kesiapsiagaan bencana banjir pada masa pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru



- b. Menganalisis kebijakan dan panduan, kesiapsiagaan bencana banjir pada masa pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru
- c. Menganalisis rencana tanggap darurat kesiapsiagaan bencana banjir pada masa pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru
- d. Menganalisis peringatan bencana kesiapsiagaan bencana banjir di masa pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru
- e. Menganalisis mobilisasi sumber daya kesiapsiagaan bencana banjir di masa pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengetahuan tambahan terkait kesiapsiagaan bencana banjir.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk perbaikan terkait kesiapsiagaan bencana banjir oleh Pemerintah Desa Kelurahan Baru Kotawaringin Barat di Masa Pandemi COVID-19.

#### **E. Keaslian Penelitian**

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Link Jurnal/Skrpsi
		Metode, Variabel, Skala Data, Instrumen, Uji Statistik		
Fikri et al., 2020	Kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menghadapi Bencana Banjir Dimasa Pandemi COVID-19	Metode : penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Instrumen : penelitian ini menggunakan pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan/observasi, dan dokumentasi.	Variabel : peneliti terdahulu meneliti mengenai kesiapsiagaan di lingkungan pemerintah kabupaten, sedangkan peneliti meneliti pada kesiapsiagaan di lingkungan pemerintah desa.	<a href="https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/download/1441/871/">https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/download/1441/871/</a>
Mas'Ul a et al.,	Kesiapsiagaan Masyarakat	Metode : penelitian ini menggunakan	Metode : peneliti menggunakan metode	<a href="https://ejournal.undiksh">https://ejournal.undiksh</a>

2019	Terhadap Bencana Banjir Di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleg	deskriptif kualitatif. Instrumen : penelitian ini menggunakan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.	campuran salah satunya dengan adanya metode kuantitatif dengan menggunakan <i>analisis statistic product moment</i> .	<a href="http://a.ac.id/index.php/JJPG/article/view/21508">a.ac.id/index.php/JJPG/article/view/21508</a>
(Taryana et al., 2022)	Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakarta	Metode : penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Variable : penelitian ini menggunakan landasan lima elemen kesiapsiagaan bencana banjir.	Variabel : peneliti terdahulu meneliti mengenai kesiapsiagaan di lingkungan pemerintah kabupaten, sedangkan peneliti meneliti pada kesiapsiagaan di lingkungan pemerintah desa.	<a href="https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/view/21508/14321">https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/view/21508/14321</a>
Septiyana et al., 2020	Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir Di Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur	Variable : penelitian ini menggunakan landasan lima elemen kesiapsiagaan bencana banjir.	Metode : penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik sampel <i>purposive sampling</i> dengan pengukuran reabilitas instrument berdasarkan Hoyt dan objek pada penelitian ini tingkat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir.	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/121/browse?type=author&amp;sort_by=1&amp;order=DESC&amp;rpp=100&amp;etal=7&amp;value=Neng+Sri+Nuraeni&amp;starts_with=T">https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/121/browse?type=author&amp;sort_by=1&amp;order=DESC&amp;rpp=100&amp;etal=7&amp;value=Neng+Sri+Nuraeni&amp;starts_with=T</a>
Rofifah, 2019	Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Upaya Penanganan Bencana Di Kecamatan Tempuran	Variabel : pengetahuan dan sikap terhadap upaya dalam mengurangi bahaya bencana banjir.	Metode : peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan desain deskriptif kolerasional dengan pendekatan <i>cross sectiona</i> , jenis bencana dan resiko bencana(Hazard).	<a href="http://repository.unimma.ac.id/2522/">http://repository.unimma.ac.id/2522/</a>